

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT PADA SELURUH PROVINSI DI
INDONESIA TAHUN 2021-2023**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : ABDUL AZIZ NAUFAL FARUQI
NPM : 125239209

**UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2025

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ABDUL AZIZ NAUFAL FARUQI
NPM : 125239209
PROGRAM / JURUSAN : S1 / AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA
SELURUH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN
2021-2023

Jakarta, 25 Juni 2025

Pembimbing



Dr. Henryanto Wijaya, S.E., M.M., Ak., CA.

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Pengesahan

Nama : ABDUL AZIZ NAUFAL FARUQI
NIM : 125239209
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Seluruh Provinsi Di Indonesia Tahun 2021-2023
Title : Analysis of the Influence of Original Local Government Revenue, Intergovernmental Transfers, and Social Assistance Expenditures on Public Welfare Across All Provinces in Indonesia for The Period 2021-2023

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 12-Juli-2025.

Tim Penguji:

1. RINI TRI HASTUTI, S.E., Ak., M.Si
2. Dr. HENRYANTO WIJAYA, S.E., M.M., Ak., CA.
3. LIANA SUSANTO, S.E., M.Si., Ak.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
Dr. HENRYANTO WIJAYA, S.E., M.M., Ak.,
CA.
NIK/NIP: 10107008

Jakarta, 12-Juli-2025

Ketua Program Studi

HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi sebagian dari syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Tarumanagara. Penyusunan skripsi ini mampu selesai dan terlaksana dengan baik berkat dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan ketulusan kepada:

1. Bapak Dr. Henryanto Wijaya, S.E., M.M., Ak., CA. sebagai dosen pembimbing peneliti yang memberi kesempatan bagi peneliti untuk menyusun skripsi ini serta memberikan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA., CA., CPA (Aust.), CSRS., ACPA. sebagai Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Kedua orang tua penulis, Atang Yuwono dan Dwi Hastuti serta adik-adik penulis.
4. Teman-teman dan rekan kerja penulis yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi. Terkhusus, Dina Ariyanti Siregar yang telah kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Terima kasih.

Jakarta, 25 Juni 2025

Peneliti,



Abdul Aziz Naufal Faruqi

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

ABSTRAK

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
PERIMBANGAN, DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA SELURUH PROVINSI DI
INDONESIA TAHUN 2021-2023**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari pemerintah daerah tingkat provinsi di seluruh Indonesia pada tahun 2021-2023. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sedangkan dana perimbangan dan belanja bantuan sosial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Kesejahteraan Masyarakat, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Bantuan Sosial

This study aims to analyze the effect of original local government revenue, intergovernmental transfers, and social assistance expenditure on public welfare. The data used in this study are secondary data from provincial governments throughout Indonesia in 2021-2023. The data were analyzed using multiple linear regression. The results obtained from this study are that original local government revenue has a positive and significant effect on public welfare, while intergovernmental transfers and social assistance expenditure do not have a positive and significant effect on public welfare.

Keywords: Public Welfare, Original Local Government Revenue, Intergovernmental Transfers, Social Assistance Expenditure

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Permasalahan	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Identifikasi Masalah.....	5
3. Batasan Masalah	6
4. Rumusan Masalah.....	6
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Gambaran Umum Teori.....	9
1. Teori Keagenan.....	9
B. Definisi Konseptual Variabel	10
1. Kesejahteraan Masyarakat	10
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11
3. Dana Perimbangan.....	12
4. Belanja Bantuan Sosial	13
C. Kaitan Antar Variabel.....	14
1. Pengaruh PAD terhadap Kesejahteraan Masyarakat	14

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	14
3. Pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	15
D. Penelitian Terdahulu.....	15
E. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis.....	20
1. Pengaruh PAD terhadap Kesejahteraan Masyarakat	20
2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	21
3. Pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Desain Penelitian	23
B. Populasi, Teknik Pemilihan Sampel, dan Ukuran Sampel	23
C. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen	23
1. Variabel Dependen	23
2. Variabel Independen	25
D. Asumsi Analisis Data	26
1. Estimasi Model Regresi Data Panel.....	26
2. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel	27
3. Uji Asumsi Klasik.....	28
E. Analisis Data	29
1. Uji Statistik Deskriptif	29
2. Uji Koefisien Determinasi <i>Adjusted R Square (Adjusted R²)</i>	29
3. Uji Statistik F (ANOVA).....	29
4. Uji Statistik t (Uji Hipotesis Parameter Parsial)	30
5. Interpretasi Model Regresi.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Deskripsi Subjek Penelitian.....	31
B. Deskripsi Obyek Penelitian	32
C. Hasil Uji Asumsi Analisis Data.....	39

1. Estimasi Model Regresi Data Panel.....	39
2. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel	41
3. Uji Asumsi Klasik.....	43
D. Hasil Uji Analisis Data	45
1. Uji Analisis Regresi Linear Berganda	46
2. Uji Koefisien Determinasi Berganda (<i>Adjusted R-Squared</i>)	47
3. Uji Simultan (Uji F).....	48
4. Uji Parsial (Uji t).....	48
E. Pembahasan	49
1. Pengaruh PAD terhadap Kesejahteraan Masyarakat	49
2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	52
3. Pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	54
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Keterbatasan dan Saran	60
1. Keterbatasan.....	60
2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1 Variabel Operasional Penelitian.....	26
Tabel 3.2 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji <i>Durbin-Watson</i>	29
Tabel 4.1 Data <i>Outlier</i>	31
Tabel 4.2 Daftar Provinsi Penelitian.....	32
Tabel 4.3 Hasil Analisis Statistik Dekskriptif	37
Tabel 4.4 Model CEM	40
Tabel 4.5 Model FEM.....	40
Tabel 4.6 Model REM	41
Tabel 4.7 Hasil Uji Chow	42
Tabel 4.8 Hasil Uji <i>Hausman</i>	42
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas	43
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas	44
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi	45
Tabel 4.12 Uji Analisis Regresi Linear Berganda	46
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi Berganda	47
Tabel 4.14 Hasil Uji Simultan (Uji F)	48
Tabel 4.15 Hasil Uji Parsial (Uji t)	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Sumber: Diolah Penulis	22
Gambar 4.1 Tren Rata-Rata PAD Tahun 2021-2023.....	33
Gambar 4.2 Tren Rata-Rata Dana Perimbangan Tahun 2021-2023	34
Gambar 4.3 Tren Rata-Rata Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021-2023	35
Gambar 4.4 Tren Rata-Rata IPM Tahun 2021-2023	36
Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas Sumber: Diolah Penulis	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2021.....	66
Lampiran 2 Data Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2022.....	69
Lampiran 3 Data Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2023.....	72
Lampiran 4 Data Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2023.....	75
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	77
Lampiran 6 Surat Pernyataan.....	78
Lampiran 7 Hasil Turnitin	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 2024, Badan Informasi Geospasial Indonesia (2024) merilis informasi mengenai peningkatan jumlah pulau di Indonesia yang terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Banyaknya pulau di Indonesia memberikan peluang bagi negara untuk memiliki sumber daya alam dan manusia yang melimpah. Kekayaan sumber daya menjadi potensi tersendiri untuk mendorong roda usaha dan perindustrian. Keuntungan ini menjadi stimulan bagi pemerintah Indonesia untuk menjalankan perekonomian nasional (Amelia & Khoirudin, 2023). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional adalah efisiensi berkeadilan dengan segala kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Terlaksananya prinsip efisiensi keadilan dapat diwujudkan dengan mengatasi kesenjangan yang ada pada setiap daerah di Indonesia. Dalam mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah ini disebut sebagai otonomi daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah melalui hak otonomi daerah memiliki kekuasaan terhadap sumber daya alam daerah dan dapat melakukan pengelolaan sesuai dengan batasan kewenangan yang telah diatur. Dengan wewenang tersebut, pemerintah daerah dapat lebih maksimal dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya karena pemerintah daerah lebih mengetahui potensi daerah yang dipimpinnya serta sistem pengelolaan yang tepat pada sumber daya yang dimiliki. Sumber daya tersebut diolah dengan tepat untuk menghasilkan pendapatan yang ditujukan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah diharapkan

dapat meningkatkan pendapatan daerah yang berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat (Sulastri & Efendri, 2021).

Namun pada kenyataannya, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas dari sumber daya manusia. Alfiantsyah dan Prasetya (2021) melalui penelitiannya terhadap kebijakan pembangunan Provinsi Papua mengungkapkan beberapa keunggulan geografis dari provinsi itu tersendiri. Papua merupakan salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alam di Indonesia. Dari segi faktor produksi, Provinsi Papua memiliki sumber daya mineral yang tinggi, hasil hutan yang berlimpah, dan aliran sungai yang besar. Pemanfaatan faktor-faktor produksi tersebut dapat dibangun menjadi sebuah industri tersendiri bagi masyarakat Papua terutama di bidang pertambangan. Kekayaan alam mineral yang dimiliki akan meningkatkan produktivitas industri tambang dalam menghasilkan komoditas. Hasil komoditas ini kemudian dapat dijual sebagai pendapatan daerah Provinsi Papua. Dari segi pariwisata, Provinsi Papua memiliki keunggulan pada keindahan alam dan keragaman jenis fauna. Hal tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Provinsi Papua. Pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi wisata yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Keuntungan potensi sumber daya yang dimiliki Provinsi Papua tercermin pada tingginya tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2023, Provinsi Papua memiliki realisasi PAD sebesar 770 miliar rupiah. Torehan ini merupakan kedua tertinggi dibandingkan dengan realisasi PAD provinsi lainnya di wilayah timur (sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2023 *Audited*). Ironisnya, perolehan PAD yang tinggi tersebut tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua justru memiliki peringkat terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di wilayah timur (sumber: bps.go.id).

Selain melakukan pengelolaan terhadap pendapatan daerah, pemerintah daerah melaksanakan belanja daerah untuk mendanai segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Salah satu jenis belanja yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat adalah belanja bantuan sosial. Belanja bantuan

sosial merupakan belanja yang dianggarkan dalam bentuk pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada masyarakat sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial tertentu. Pemberian bantuan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pada masyarakat daerah sehingga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah secara umum (Nasrullah & Annisa, 2021).

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang paling sering disorot perihal program bantuan sosial untuk masyarakatnya. Hal ini terjadi karena isu kemiskinan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu isu yang selalu menjadi perbincangan pada media maupun forum resmi. Strategi penanggulangan kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai bantuan oleh Pemerintah Jawa Tengah. Bantuan dari segi ekonomi dilakukan dalam bentuk pemberian dana stimulan sebagai modal usaha kegiatan ekonomi. Bantuan dari segi pendidikan dilakukan melalui penyediaan program pendukung pendidikan seperti program sekolah gratis dan program beasiswa miskin. Keseluruhan program bantuan sosial tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah secara umum. Namun hasil pemberian bantuan sosial tersebut tidak menggambarkan hasil yang baik untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah karena persentase tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih menempati salah satu yang tertinggi di Pulau Jawa (Budianto, 2022).

Berdasarkan fenomena yang terjadi, pemerintah daerah perlu melaksanakan pembangunan daerah untuk mengatasi masalah kesejahteraan yang terjadi pada masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, pemerintah daerah memerlukan sumber pendanaan yang memadai. Salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari PAD. PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari pengelolaan sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. PAD bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dengan cara pemerataan pembangunan bagi masyarakat (Sofyan, 2023). Melalui peningkatan PAD, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulastris dan Efendri (2021) yang menyimpulkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. IPM merupakan salah satu indikator yang dapat

digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menyatakan bahwa setiap peningkatan PAD pada suatu daerah akan meningkatkan IPM. Penelitian Wibisono, Suprayitno, dan Asnawi (2024) juga memiliki hasil yang serupa bahwa setiap peningkatan PAD berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun sebaliknya, penelitian Harmayanti, Semailla, Rahman, dan Manulusi (2021) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian Riviando dkk. (2019) juga sepakat bahwa PAD tidak terbukti berpengaruh terhadap IPM. Peningkatan dari PAD tidak memiliki andil dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia di daerah. Penelitian tersebut menyatakan bahwa tidak berpengaruhnya PAD terhadap peningkatan IPM disebabkan oleh pengelolaan PAD oleh pemerintah belum optimal.

Selain PAD, salah satu sumber utama pendapatan daerah adalah dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemberian dana perimbangan memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi pada setiap daerah. Alokasi dana perimbangan pada pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sulastri & Efendri, 2021). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosita dan Sutrisna (2018) menyimpulkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mengharapkan alokasi dana anggaran digunakan dengan baik dalam pelaksanaan belanja daerah. Sementara itu, penelitian Putra dan Dewi (2018) menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Peneliti menyimpulkan bahwa alokasi anggaran pada dana perimbangan belum mampu meningkatkan komponen kualitas sumber daya masyarakat daerah seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

Pemerintah daerah tidak bisa hanya berfokus pada pengelolaan pendapatan daerah. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah, pemerintah daerah juga melakukan berbagai program untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi pada masyarakat melalui program bantuan sosial. Program bantuan sosial ini

tercantum pada belanja bantuan sosial pada struktur APBD. Pengalokasian belanja bantuan sosial secara tepat juga diperlukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Tamara dan Yewati (2020) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang bantuan sosial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah di bidang bantuan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum namun kenaikan ini tidak terjadi secara stimulan. Hal ini disebabkan karena program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah masih bersifat kuratif (penyembuhan) seharusnya program bantuan sosial yang dilaksanakan lebih bersifat preventif (pencegahan). Berlawanan dari penelitian sebelumnya, penelitian Kusuma dan Arif (2022) serta Mufidah (2021) menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor bantuan sosial tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian ini menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat daerah tidak berpengaruh melalui program bantuan sosial dikarenakan distribusi yang tidak merata terhadap bantuan yang diberikan.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, penulis akan menguji kembali pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat daerah. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terdapat pada data yang diolah. Penelitian ini menggunakan data seluruh pemerintah daerah di Indonesia pada tingkat provinsi dengan harapan hasil penelitian yang disajikan dapat menggambarkan kondisi negara Indonesia secara keseluruhan.

2. Identifikasi Masalah

Pemerintah daerah wajib memberi perhatian lebih terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditingkatkan melalui pembangunan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kualitas masyarakat. Pembangunan dilakukan dengan pengalokasian anggaran daerah dalam urusan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi disparitas pada setiap daerah. Pembangunan

yang merata akan membuat masyarakat merasakan manfaat positif hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah (Fitrawaty, 2023)

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh PAD, dana perimbangan, dan belanja bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat daerah. Penelitian terdahulu yang menghubungkan pengaruh setiap variabel menuai pro dan kontra karena hasilnya berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian kembali untuk menguji pengaruh antara PAD, dana perimbangan, dan belanja bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat daerah. Penelitian ini memiliki judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Seluruh Provinsi Di Indonesia Tahun 2021-2023”.

3. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengaruh PAD, dana perimbangan, dan belanja bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. Variabel bebas (independen) yang digunakan dalam penelitian ini sebatas pada PAD, dana perimbangan, dan belanja bantuan sosial. Selain itu, penelitian ini menggunakan satu variabel terikat (dependen) yaitu kesejahteraan masyarakat daerah yang diukur dengan indeks pembangunan manusia. Subjek penelitian dibatasi pada seluruh pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia pada periode 2021-2023.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Apakah PAD memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?
- b. Apakah dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?
- c. Apakah belanja bantuan sosial memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap poin-poin berikut.

- a. Menganalisis pengaruh PAD terhadap kesejahteraan masyarakat.
- b. Menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat.
- c. Menganalisis pengaruh belanja bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan, bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan literatur, dan bagi para ahli dan masyarakat umum sebagai wawasan dan pengetahuan. Manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Manfaat bagi pembuat kebijakan.
 - 1) Menjadi dasar perbaikan bagi pengambilan kebijakan di pemerintah daerah provinsi di seluruh Indonesia terutama dalam penyusunan APBD.
 - 2) Mendorong dilakukannya perbaikan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.
 - 3) Mendorong dilakukannya evaluasi terhadap setiap perencanaan program yang dilaksanakan oleh pemerintah
- b. Manfaat bagi literatur.
 - 1) Berkontribusi dalam memperkaya pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat
 - 2) Menjadi landasan teoritis bagi bahan acuan penelitian yang akan datang khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik.
 - 3) Menjadi bahan perbandingan dengan studi-studi selanjutnya, baik dari aspek metode, hasil, maupun analisis, sehingga memperkaya ragam pendekatan dalam riset di bidang ini.
- c. Manfaat bagi wawasan dan pengetahuan.

- 1) Menjadi sumber wawasan dan pengetahuan bagi para praktisi di bidang keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Memberikan informasi bagi masyarakat terkait pengaruh pelaksanaan keuangan daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Memberikan pandangan bagi masyarakat terhadap setiap pelaksanaan program yang direncanakan oleh pemerintah sebagai bahan pemberian kritik dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiantsyah, S., & Prasetya, O. B. (2021). *Dampak Kebijakan Pembangunan di Papua terhadap Kesejahteraan Masyarakat Papua - Kajian Aspek Ekonomi dan Sosial*.
- Amelia, R., Khoirudin, R., Ekonomi, F., & Dahlan, U. A. (2023). Analisis yang Mempengaruhi Foreign Direct Investment di Indonesia. *Jurnal Multidisipliner KAPALAMADA* |Vol 2. No 1 Maret 2023 553
- Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ernitawati, Y., & Dumadi. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 60–80. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165>
- Azfirmawarman, D., Magriasti, L., & Yulhendri. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia (Kajian Perubahan Metodologi Penghitungan) Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*. 5.
- Badan Informasi Geospasial. (2024). *Pulau Indonesia Bertambah Jadi 17.380, Mengapa Angkanya Berubah Setiap Tahun?*
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia 2023*.
- Bergman, M., & Lane, J.-E. (1990). Public Policy in a Principal-Agent Framework. *Journal of Theoretical Politics*.
- Budianto, A. (2022). *Analisis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020*.
- Edri, O., Yusrawati, & Siska. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagari Kecamatan Lintau Buo Sumatera Barat. Dalam *Available Journal of Islamic Finance and Accounting Research (JAFAR)* (Vol. 1, Nomor 2).
- Fitrawaty. (2023). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Harmayanti, Semailla, B., Rahman, Z., & Manulusi, M. R. (2021). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Harsono, I., Purnama, I., Firmansyah, M., Irwan, M., & Sutanto, H. (2024). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi NTB Tahun 2013-2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 802–810. <http://journal.yrpioku.com/index.php/msej>
- Ina, Y. T., & Hudang, A. K. (2024). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1234–1245. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2718>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Dalam *Journal of Financial Economics* (Nomor 4). Harvard University Press. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Kireina, N. Y., & Octaviani, A. (2021). Analysis of Regional Taxes, Regional Levies, and Results of Separated Regional Wealth Management Against Regional Original Income of Semarang Regency in 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 32–37. <http://e-journal.stie-aub.ac.id>
- Kusuma, A. P., & Arif, M. (2022). An Analysis of the Effectiveness of Local Government Expenditure Allocations in Education, Health, Social Assistance, and Per Capita Income on The Human Development Index in The Pati Residency.
- Mattoasi, Musue, D. P., & Rauf, Y. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 100–109.
- Mufidah, N. (2021). Efektivitas Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Sosial dan Sains*, 1.
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Ria, C. E. (2021). *Penelitian Bisnis dengan SPSS STATA dan Eviews* (1 ed.). Madenatera.
- Nasrullah, M. A., & Annisa, R. (2021). Analisis Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tanah Laut Pada Masa Pandemi Covid-19. 4(2).

- Putra, P. P. M. E., & Dewi, M. H. U. (2018). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(10).
- Rahmayanti, A., & Pertiwi, I. F. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(1). <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>
- Riviando, A., Agustin, H., & Halmawati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 1–17. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/1>
- Rosita, I. A. P. M., & Sutrisna, I. K. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business* (7 ed.). John Wiley & Sons. www.wileypluslearningspace.com
- Sofyan, V. R. W. (2023). *Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*. 9(1).
- Sri, L., & Suyana, U. M. (2019). The Effect of Local Government Own Revenue and Revenue Sharing Funds on Economic Performance and Community Welfare through Capital Expenditure of Regency / City in Bali Province, Indonesia.
- Sudirman, & Tantuka, Z. (2024). Kinerja Kepala Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. 1(1).
- Sugiyanto, E. K., Subagyo, E., Adinugroho, W. C., Jacob, J., Berry, Y., Nuraini, A., Sudjono, & Syah, S. (2022). *Konsep dan Praktik Ekonometrika Menggunakan Eviews* (M. Surur, Ed.). Academia Publication.
- Sulastri, E., & Efendri. (2021). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap indeks pembangunan manusia seluruh provinsi di Kalimantan tahun anggaran 2015-2019. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 6(2), 85–96. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i2.572>

- Tamara, Y., & Yewiwati. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Bantuan Sosial dan Kesehatan, Konsumsi Rumah Tangga dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. 2(3), 63–68.
- Tang, S. A., Maro, Y., Gorang, A. F., & Maruli, E. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(9), 384–399. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7209226>
- UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
- UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
- UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
- United Nations Development Programme. (2024). *Human Development Report 2023/2024*.
- Wibisono, N., Suprayitno, E., & Asnawi, N. (2024). The Influence of Original Local Government Revenue and Capital Expenditures on Economic Growth and Community Welfare. Dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 22, Nomor 01).